

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**



Disusun oleh :
SION TARIGAN

NPM : 06 05 09524
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**



Disusun oleh :
SION TARIGAN

NPM : 06 05 09524
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**



**Diajukan oleh :
SION TARIGAN**

NPM : 06 05 09524
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan.

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 April 2012

Dosen Pembimbing,



Y. Hartono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 20 April 2012

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

Ketua : Sumyar., S.H M.Hum.

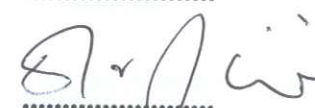
Sekretaris : Y. Hartono., S.H M.Hum.

Anggota : B. Hestu Cipto Handoyo., S.H M.Hum

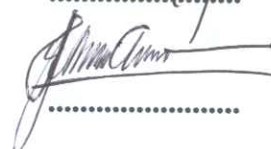
Tanda Tangan



.....



.....



.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H., M.Hum.

Motto

Dengarkan Terus Irama Perlawanan

Terhadap Segala Bentuk Penindasan

Di Bumi Pertiwi

~ KamSi ~

Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya,
dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar disekelilingnya

~ Bung Karno ~

Halaman Persembahan

Penulisan Hukum / Skripsi ini kupersembahkan untuk

Ibunda Terkasih...

Tuhan Sang Pencipta selalu memberkati, diberi kesehatan dan
berumurlah yang panjang...

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta semesta alam karena berkat dan rahmatnya yang senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Memberi penulis kemampuan untuk menuangkan segala pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama menapaki perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum / skripsi ini berjudul “Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil”. Dalam study ketatanegaraan dan ilmu pemerintahan koalisi partai politik merupakan isu yang sentral. Koalisi partai politik ini dipraktikkan dalam pemerintahan SBY – Boediono atau yang sering disebut sebagai Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II). Namun berbagai persoalan muncul yang merupakan implikasi dari dibentuknya koalisi partai politik ini, baik terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah) maupun legislatif (dewan perwakilan rakyat).

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Y. Hartono, S.H M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum / skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluahkan serta pemikiran-pemikiran yang diberikan kepada penulis;

3. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H M.Hum. Terima kasih atas diskusinya.
4. Seluruh karyawan dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Ibunda terkasih yang penuh kesabaran dan pengertian serta dukungan moril, materiil dan spiritual yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan study dan penulisan hukum / skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Mas Sutoro S.B. terima kasih atas bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan kepada penulis, juga terima kasih atas pemikiran – pemikiran ke-indonesia-an serta bimbingan spiritualnya;
7. Mas Wuryadi, Mas Wisnu Wardana, Mb Anik Yudastawa, Mas Priyo, Mas Kawir. Terima kasih atas pemikiran – pemikirannya;
8. CT Gejayan seperti Mas Andri Widiatmo, Mas Bawor, Romo Wisnu, Mas Susilo, Bang Robert, Mas Wahyu, Andi Andong “the new aidit”, atas segala pemikiran dan diskusi yang diberikan. Terkhusus juga kepada Mas Arif dan Paman Londo yang selalu bersedia menerima segala keluhan dan arahan pemikiran yang diberi dalam 2 tahun selama duduk di Dewan Pimpinan Cabang.
9. Kawan seperjuangan di banteng miring, Juanta, Ari, Caya, Jimi, Herman, Bintar, Toha, Edy, dll;
10. Paulus Beny Halim, S.H dan Rico Andryan Pakpahan, S.H. atas persahabatan diantara kita.
11. Komandan banteng miring Kom Atma Jaya Fati Lazira, Martha, Warda, James, Lias, dll. Lanjutkan perjuangan bung.
12. Ricky Irawan Sitepu atas semua bantuannya dalam proses penyelesaian penulisan hukum / skripsi ini dan buat Loina terima kasih atas bantuan fasilitas yang diberikan;
13. Romero Gtg.,S.Kom dan keluarga. Terima atas semuanya;

14. Jesaya Hendra Agusnar Purba, Mattias Mauris Tarigan, Jhon Fery Situmorang “Kojek” atas semua yang dilalui bersama ketika sampai di Yogyakarta. Juga terima kasih kepada Leo Purba atas tumpangnya.
15. Rekan-rekan di Partai Mahasiswa Nasionalis (PamaN).
16. Komunitas Jambur Purpur Sage (JPS) Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
17. Genk Ijo’s.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca penulisan hukum / skripsi ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi perkembangan ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

Yogyakarta, 25 April 2012

Penulis



Sion Tarigan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2012

Yang menyatakan,

Sion Tarigan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Keaslian penelitian	9
F. Batasan konsep	12
G. Metode penelitian	13
1. Jenis penelitian	13
2. Sumber data	14

3. Metode pengumpulan data	15
4. Metode analisis	15
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Sistem pemerintahan	16
B. Sistem pemerintahan parlementer	18
1. Lembaga eksekutif	21
2. Lembaga legislatif	23
3. Hubungan antara eksekutif dengan legislatif	24
C. Sistem pemerintahan presidensiil	25
1. Lembaga eksekutif	28
2. Lembaga legislatif	31
3. Hubungan antara eksekutif dengan legislatif	32
D. <i>Check and balances</i>	34
E. Koalisi	38
F. Sistem pemerintahan presidensiil menurut Undang-Undang Dasar 1945	41
1. Lembaga eksekutif	42
2. Lembaga legislatif	44
3. Hubungan antara eksekutif dengan legislatif	49

BAB III PEMBAHASAN	50
A. Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan	
Presidensiil	50
1. Implikasi Koalisi Partai Politik dalam Pemerintahan	
Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan ...	61
2. Implikasi Koalisi Partai Politik dalam Pemerintahan	
Terhadap Mekanisme <i>Check and Balances</i> Antara	
Lembaga Legislatif (dewan perwakilan rakyat)	
dengan Lembaga Eksekutif (Pemerintah)	70
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Tabel

Table I : Jumlah Menteri KIB Jilid II dari Partai Politik dan Non Partai	hal 66
Table II : Peta Kekuatan di DPR	hal 73

Abstract

Practice in political parties' coalition done in the government which is held by President SBY has created many state affairs problems and it is not effective to run the presidential government system and to maintain the government stability. Besides, the big power from the representatives makes presidents powerful and president can influence voting in that institution. Based on that background above, I state problem as the following: 1. How is the implication of political parties in the government towards the effectiveness of governmental administration? 2. How is the implication of political parties' coalition in the government towards check and balance mechanism between legislatives (Indonesian Legislative Assembly) and executives? This research is aimed to collect data which consequently be analyzed to know how the implication of political parties coalition in the government towards the effectiveness of governmental administration is and to know how the implication of implication of political parties coalition in the government towards *check and balance* mechanism between legislatives (Indonesian Legislative Assembly) and executives is. The type of research in law writing / thesis is normative law research, that is a research focusing on norm (law in book) in form of constitutions. This research needs secondary data as the main data. The method of collecting data in the thesis is a library research. Normative law research uses qualitative analysis which involves qualitative measure. Deductive thinking is used in thinking process to draw a conclusion. By maintaining political parties coalition in President SBY's governmental system, it brings effect on the ineffectiveness towards governmental administration which is labeled by the 'loss' of president's constitutional rights to determine the cabinet in his hand. Besides, the coalition also impacts on the absence of check and balance mechanism between legislatives (Indonesian Legislative Assembly) and government (executives), which can be identified in the 'loss' of representatives' constitutional rights. Government can effectively execute the governmental administration when president as the head of the government is consistent to carry out the governmental affairs fitting with the characteristic of presidential system. The Indonesian Legislative Assembly (legislatives) and government (executives) constantly do their constitutional functions as mandated by constitution and they keep their independency to facilitate check and balance mechanism of both institutions, particularly the controlling function of legislatives (Indonesian Legislative Assembly) towards governmental administration done by executives.

Key words: political parties' coalition, presidential government system, relation between Indonesian Legislative Assembly (legislative) and government (executive).